



**PERENCANAAN DAN MANAJEMEN STRATEJIK
CHAPTER 8-14**

Dr. Maya Puspita Dewi, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

The background of the page features a repeating pattern of the Universitas Esa Unggul logo. Each logo consists of a stylized circular emblem with blue and orange curved lines, positioned above the text 'Universitas Esa Unggul'.

CHAPTER 8

Uraian

KONSEP KESEJAHTERAAN

PENGERTIAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Negara kesejahteraan (welfare state) merujuk pada sebuah model negara yang memfokuskan diri pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Negara memberikan pelayanan social kepada masyarakat secara universal dan komprehensif.

Konsep welfare state di Inggris dipahami sbg alternative terhadap the poor law yg ditujukan utk memberi bantuan kpd orang miskin (Paul Spicker, 2002). Berbeda dengan system dalam the poor law, negara kesejahteraan focus pada system perlindungan social. Tujuan negara kesejahteraan adalah menyediakan sejumlah layanan social bagi seluruh penduduk, baik orang tua anak anak, miskin, kaya. Ini sebagai upaya mengintegrasikan system sumber daya dan penyelenggaraan jaringan layanan yang dapat mengelola dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Negara kesejahteraan bukan merupakan metode utk mengubah system ekonomi pasar ke sosialistik dengan menyiratkan bahwa ekonomi sosialis adalah system ekonomi tanpa pasar. Hal ini bukanlah tujuan dari negara kesejahteraan.

Hak hak dasar kesejahteraan dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi; termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, Pendidikan, Kesehatan

dan beberapa hak kepemilikan atas harta benda. Persoalannya adalah bagaimana memformulasikan suatu strategi dan model agar kesejahteraan bagi masyarakat tersebut dapat tercapai.

Menurut Ross Cranston (1985), konsep negara kesejahteraan tersebut dapat dicapai melalui tiga model. Model pertama, negara kesejahteraan dapat dibangun melalui regulasi kesejahteraan social (social welfare regulation) yang ditujukan dengan pemberlakuan Undang Undang Kesejahteraan Sosial dan bentuk bentuk landasan hukum tentang kesejahteraan social lainnya. Penerapan regulasi ini melalui institusi yang berwenang, peranan dari peradilan yang independent dan terbuka, serta regulasi yang efektif. Model kedua, negara kesejahteraan memerlukan regulasi tentang pelayanan public, serta keikutsertaan masyarakat dalam kesejahteraan social. Terkait parameter pelayanan public yang universal, praktik terbaik pada pelayanan menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan bagi negara atau pemerintah. Model ketiga, melalui undang undang kesejahteraan social yang mana masyarakat mendapatkan manfaat dari kebijakan menganiai kesejahteraan, pengendalian social, dan administrasi kesejahteraan social. Tujuan utama kesejahteraan social adalah penetapan standar kehidupan minimum, kesetaraan untuk kepentingan bersama.

Negara kesejahteraan mengacu pada peranan pemerintah yang responsive dalam mengelola perekonomian, Pemerintah mampu menjalankan tanggungjawabnya dalam menjamin ketersediaan kehidupan dasar masyarakat.

Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empiris terkait kegagalan pasar (market failure) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (state failure) pada masyarakat sosialis (Edi Suharto, 2008).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Hal ini cukup menarik karena konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis bukan di negara-negara sosialis.

MOTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Dalam teori pembangunan untuk negara kesejahteraan (welfare state) menggunakan pendekatan struktural neo-marxis yang telah dikembangkan oleh Jill Quadagno (1998). Pendekatan ini lebih memperhatikan peranan kelas sosial dan negara. Jill Quadagno (1998) berpendapat bahwa program kesejahteraan bukan merupakan karakteristik yang unik dari negara-negara kapitalis maju dan hal ini muncul setidaknya sejak abad ke-16 yang mana manfaat kesejahteraan masyarakat telah difungsikan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat rentan dan mengalokasikan tenaga kerja. Dengan demikian program kesejahteraan telah dikembangkan untuk merespon perkembangan kapitalisme industri, serta sifat dan bentuk negara kesejahteraan yang ditentukan oleh karakteristik masyarakat dalam organisasi produksi. Negara kesejahteraan selalu bertentangan dengan property dan kekuatan pasar.

Kemampuan pekerja untuk mendapatkan manfaat sosial dari pasar tergantung pada posisi pekerja dalam hierarki negara (Jill Quadagno, 1998).

Identifikasi karakteristik masyarakat dalam organisasi produksi menurut Jill Quadagno mengacu pada dua pandangan utama dalam tulisan neo-marxis yaitu: Pertama, negara adalah hanya relative otonom dalam mediasi antar kelas sosial yang berbeda,

Dua, operasional proses politik ada pada beberapa tingkatan yang berbeda.

Prinsip teori Marxist terkait negara secara umum adalah batas negative otonomi yaitu, negara dalam jangka Panjang hanya dapat sesuai dengan kepentingan politik dari kelas dominan.

Negara kesejahteraan ditentukan oleh kepentingan negara atau pemerintah.

Negara kesejahteraan dapat terbentuk melalui:

a. Negara sebagai pusat

Pendekatan ini menekankan peran negara dalam pengembangan negara kesejahteraan (Theodor Skocpol, dkk, 1995). Dalam ini terdapat dua aspek, pertama, negara tidak hanya merepresentasikan tuntutan atau kepentingan kelompok sosial, kelas atau masyarakat, namun juga merujuk pada kemungkinan bahwa Tindakan negara sepenuhnya otonom. Kedua, negara merupakan konfigurasi organisasi dan kebijakan yang mampu mempengaruhi makna dari sistem politik bagi semua kelompok dan kelas

dalam masyarakat. Negara memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan segala sesuatunya

b. Pendekatan kelembagaan secara luas

Para aktor utama dari pendekatan negara sebagai pusat, selanjutnya mengembangkan teorinya lebih lanjut (Anna Shola Orloff, 1993). Dalam penelitiannya telah menekankan adanya pendekatan pemerintah terpusat yang memperlihatkan pemerintah sebagai fokus utama sebuah kebijakan. Namun kerangka kerja yang dimaksud tersebut tidak hanya meliputi negara, tetapi juga organisasi partai dan kelompok politik aktif. Lembaga Lembaga tersebut merupakan bagian dari Lembaga lembaga pemerintah dan mengalami 4 jenis proses yaitu:

1. Pembentukan negara, partai, dan sistem transformasi
2. Pengaruh identitas politik, serta tujuan dan kapasitas kelompok sosial
3. Kesesuaian antara tujuan dengan kepentingan kelompok
4. Pengaruh umpan balik kebijakan.

PRINSIP KESEJAHTERAAN

Keseimbangan

Keseimbangan berarti setiap orang mendapatkan pemenuhan atau kepuasan pada tingkat yang sama. Jika prinsip ini diterapkan, maka subsidi yang diperlukan akan sangat mahal.

Beberapa ahli mendukung tepori kesetaraan atau keseimbangan kesejahteraan. Keseimbangan kesejahteraan lebih merujuk pada pendapat bahwa anggaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya kesejahteraan pada tingkat minimal bagi setiap warganya.

Kebebasan

Kebebasan tidak dapat diartikan sebagai saat siapa pun dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Sesuai prinsip yang mengatur reformasi hukum, politik, sosial dan etika. Kebebasan untuk kesejahteraan berarti dukungan kebebasan dan bagi setiap orang untuk merasakan kepuasannya tanpa mengganggu kebebasan orang lain.

Kewarganegaraan

Setiap warga negara berhak merasakan kesejahteraan. Dengan kata lain, kesejahteraan memang diciptakan untuk setiap warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikannya terutama pada masyarakat rentan (yang paling berpotensi tidak dapat merasakan kesejahteraan). Selain itu sumber utama pembiayaan program kesejahteraan umumnya berasal dari pajak yang dipungut oleh negara.

Tujuan negara kesejahteraan

Tujuan utama dari kebijakan kesejahteraan secara umum adalah upaya mendukung tingkat standar hidup masyarakat melalui bantuan pengentasan

kemiskinan dengan menjamin pasokan layanan sosial yang vital seperti Kesehatan dan pendidikan. Tujuan dari kebijakan kesejahteraan (di Inggris) menurut Andrew Nuter (2014) adalah upaya pemerintah (partai) untuk mengatasi masalah ketergantungan. Dalam pengertian ini pemerintah menyediakan jaring pengaman ataupun tangga untuk menyeleraskan tingkat kehidupan para penanggur dalam masyarakat. Jaring pengaman sendiri berfungsi untuk melindungi sekaligus mengurangi populasi masyarakat rentan dan rumah tangga dengan kategori miskin.

Tujuan kebijakan kesejahteraan melalui bantuan pengentasan kemiskinan untuk mendukung tingkat standar hidup masyarakat:

1. Untuk menjamin pasokan layanan sosial yang sebelumnya dianggap tidak memadai atau bahkan tidak disediakan oleh pasar
2. Untuk berperan sebagai mekanisme dalam memberikan tingkat keadilan dan kesetaraan sosial
3. Untuk meningkatkan integrasi dan kohesi sosial, serta tidak menimbulkan ketergantungan.

SISTEM NEGARA KESEJAHTERAAN

Persinggungan antara sistem kapitalisme dan sosialisme inilah yang melahirkan negara kesejahteraan dengan berbagai model:

1. Model universal

Pada dasarnya pelayanan sosial diberikan pada seluruh warganegara baik kaya maupun miskin secara merata. Model ini sering disebut the Scandinavian welfare state yang diwakili oleh Swiss, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Sebagai contoh negara kesejahteraan swedia seringkali dijadikan rujukan sebagai model idela yang memberikan pelayanan sosial yang komprehensif kepada seluruh warganegaranya.

2. Model Institusional

Model ini disebut dengan model korporasi atau work welfare atates. Seperti model universal, jaminan sosial juga dilakukan di model ini secara luas dan melembaga, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial bertsal dari pihak krtiga, yakni pemerintah, duania usaha, dan pekerja (buruh). Contoh negara penganut model ini adalah Jerman dan Austria, dsebut model Bismarck

3. Model residual

Model ini dianut oleh negara negara Anglo-Saxon, seperti Ameriak Serikat, Inggris, Australia damn Selendia baru. Layanan sosial khususnya kebutuhan dasar diberikn terutama kepada kelompok kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups), seperti masyarakt miskin, penganguran, kaum difabel, dan lanjut usai (yg tidak mampu).

Tiga elemn yang menandai model ini di Inggris adalah:

- a. Jaminan standar minimum termasuk pendapatan minimum.
- b. Perlindungan sosial pada saat munculnya resiko
- c. Pemberian layanan yang sebaik mungkin.

Model ini mirip dengan model universal yang memberikan layanan sosial berdasarkan hak warganegara dan memiliki cakupan yang luas. Namun seperti di Inggris, jumlah tanggungan dan layanan relative lebih kecil dan pendek jika dibandingkan dengan model Universal

4. Model minimal

Model ini umumnya diterapkan di negara-negara latinm seperti Spanyol, Cile, Brasil) dan Asia seperti Korea Selatan, Filipina, Srilangka dan Indonesia. Model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yg nilai besarannya tidak besar. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan kepada pegawai negeri, anggota TNI dan pegawai swasta yg mampu membayar premi.

ELEMEN NEGARA KESEJAHTERAAN

Asa Briggs dalam sebuah esai di negara kesejahteraan Inggris mengidentifikasi tiga elemen utama dalam negara kesejahteraan adalah:

- Jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum
- Perlindungan social terkait ketidakamanan

- Penyediaan layanan pada tingkat terbaik yg memungkinkan

Dengan kata lain, negara kesejahteraan harus mengndung setidaknya dua elemen, misalnya dana pendidikan yang lebih besar bagi pihak-pihak yang kurang beruntung (idealnya, dengan tambahan dana dari pihak swasta) dan asuransi Kesehatan yang universal. Dalam menetapkan standar minimum harus ada consensus yang jelas pada tujuan yang ingin dicapai negara. Contoh di Eropa, standar minimum seringkali didasarkan pada penyebutan minimum secara umum. Contoh negara sosial yg maju yang berbeda dengan standar minimum negara sedang berkembang.

SIKLUS NEGARA KESEJAHTERAAN

Pandangan tentang terbentuknya negara kesejahteraan berkembang selama beberapa decade antara lain:

Negara Kesejahteraan yang muncul sebagai Bagian dari Logika Industrialisasi

Teori kesejahteraan cenderung mengadopsi pendekatan struktural atau fungsionalis terhadap perkembangan negara kesejahteraan. Dengan kata lain, negara kesejahteraan muncul untuk memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat terhadap industrialisasi, modernisasi, atau kapitalisasi. Pemahaman fungsionalis atas perkembangan negara kesejahteraan dijelaskan oleh Kerr, dkk (1960). Kerr menyatakan bahwa dunia sedang memasuki masa baru, yakni

era industrialisasi. Dengan industrialisasi berarti terdapat transisi dari masyarakat agraris atau komersial menjadi masyarakat industri

Berkembang sebagai Respons terhadap Kebutuhan Kapitalisme Lanjutan

Jika fungsionalisme menekankan adanya peranan positif bahwa pengeluaran kesejahteraan harus berperan dalam memastikan kelancaran fungsi masyarakat.

Negara Kesejahteraan merupakan Produk Modernisasi Masyarakat

Pendekatan fungsionalis dikembangkan melalui konsep modernisasi, dimana negara kesejahteraan merupakan fenomena umum modernisasi. Hal ini sebagai tolak ukur peningkatan diferensiasi produk dan pertumbuhan masyarakat disatu sisi, dan proses mobilisasi sosial dan politik pada sisi yang lain

Negara Kesejahteraan dibentuk oleh Perebutan Politik dan Kelas Sosial

Berbagai studi mengkritik penekanan dalam pendekatan struktural terhadap kebutuhan fungsional yang terkait dengan persyaratan industrialisme dan komposisi penduduk, bukan yang terfokus pada peranan politik dan kelas sosial dalam menentukan struktur negara kesejahteraan (Gosta Esping-Andersen dan Walter Korpi, 1987). Riset ini secara khusus menekankan pada pentingnya mobilisasi tenaga kerja (atau penerima upah) dan partai-partai demokratis atau partai sayap kiri (sosial).

Latihan

1. Apa Model Residual dalam system kesejahteraan?
2. Jelaskan siklus negara kesejahteraan secara singkat?

Kunci Jawaban

1. Model Residual. Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Layanan sosial khususnya kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups), seperti masyarakat miskin, pengangguran, kaum difabel, dan lanjut usia (yg tidak mampu). Tiga elemen yang menandai model ini di Inggris adalah:
 - i. Jaminan standar minimum termasuk pendapatan minimum.
 - ii. Perlindungan sosial pada saat munculnya resiko
 - iii. Pemberian layanan yang sebaik mungkin.

2. Siklus negara kesejahteraan antara lain:

Negara Kesejahteraan yang muncul sebagai Bagian dari Logika Industrialisasi

Teori kesejahteraan cenderung mengadopsi pendekatan structural atau fungsionalis terhadap perkembangan negara kesejahteraan. Dengan kata lain, negara kesejahteraan muncul untuk memenuhi tingkat

kebutuhan masyarakat terhadap industrialisasi, modernisasi, atau kapitalisasi.

Berkembang sebagai Respons terhadap Kebutuhan Kapitalisme Lanjutan

Jika fungsionalisme menekankan adanya peranan positif bahwa pengeluaran kesejahteraan harus berperan dalam memastikan kelancaran fungsi masyarakat.

Negara Kesejahteraan merupakan Produk Modernisasi Masyarakat

Pendekatan fungsionalis dikembangkan melalui konsep modernisasi, dimana negara kesejahteraan merupakan fenomena umum modernisasi.

Negara Kesejahteraan dibentuk oleh Perebutan Politik dan Kelas Sosial

Berbagai studi mengkritik penekanan dalam pendekatan struktural terhadap kebutuhan fungsional yang terkait dengan persyaratan industrialisme dan komposisi penduduk,

Daftar Pustaka

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat, 2016
2. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmit, 2010

The background of the page features a repeating pattern of the Universitas Esa Unggul logo. Each logo consists of a stylized circular emblem with blue and orange curved lines, positioned above the text 'Universitas Esa Unggul'.

CHAPTER 9

Uraian

Pendahuluan

Apabila seseorang melakukan investasi artinya seseorang yang menempatkan dananya untuk bekerja. Beberapa cara melakukan investasi antara lain dengan :

- Membeli saham
- Obligasi
- Reksadana
- Realestat, atau
- Bisnis sendiri

Intinya metode apa yang dipilih untuk menginvestasikan dana bukan persoalan utamanya karena tujuan investasi adalah untuk menempatkan dana agar dapat bekerja untuk menghasilkan keuntungan tambahan.

Investasi bisa diartikan sebagai istilah yang memiliki beberapa pengertian dalam bidang keuangan dan ekonomi (Wikipedia). Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk melakukan kegiatan produksi di masa yang akan datang (barang produksi), seperti pembangunan rel kereta api, jembatan, pembukaan lahan, termasuk misalnya seseorang yang mengambil pendidikan di sebuah universitas. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aset dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Kadangkala investasi juga diartikan sebagai penanaman modal.

Disisi lain, investasi merupakan suatu penanaman factor factor produksi dalam kegiatan kegiatan tertentu. Hal ini berarti bahwa investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan upaya penarikan sumber sumber dana yang digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat ini, dimana dengan barang modal tersebut akan dihasilkan sejumlah produk baru dimasa mendatang. Investasi juga merupakan keputusan mengalokasikan dana pada saat ini , baik disektor riil maupun disektor keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, penghasilan, atau laba yang lebih besar di masa mendatang. Invetasi dari dana kontribusi dari kas juga digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat dimasa yang akan datang.

Investasi Dana dari hasil kontribusi kas dan efisiensi

Setipa individu melakukan investasi untuk meningkatkan kemakmuran. Jadinya investasi itu tidak selalu yang memiliki harta/ uang berlebih namun juga bisa dilakukan bagi mereka yang sudah memenuhi kebutuhan sehari hari, maka dapat melakukan investasi dan bisa atau layak disebut sebagai investor.

Investasi dari dana hasil kontribusi kas sangat penting untuk masa depan karena kebutuhan pelayanan terus bertambah. Kebutuhan ini adalah Pendidikan, sarana transportasi, kesehatan, tempat tinggal, kebutuhan untuk rekreasi, ibadah, sampai pada kebutuhan untk masa tidk produktif. Olekarenanya dan hasil kontribusi dari kas perlu diinvestasikan.

Peranan investasi dalam system makro ekonomi antara lain:

1. Memberikan kontribusi barang modal untuk permintaan saat ini dengan meningkatkan pengeluaran domestik.
2. Memperbesar basis produksi (modal terpasang) untuk peningkatan kapasitas produksi
3. Modernisasi proses produksi yang meningkatkan efektifitas biaya
4. Mengurangi kebutuhan tenaga kerja per unit output yang berpotensi menghasilkan produktifitas yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih rendah
5. Memungkinkan produksi produk baru yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dalam produksi
6. Menggabungkan inovasi internasional dan standar kualitas untuk mengurangi kesenjangan dengan negara yang lebih maju, membantu kegiatan ekspor, dan berpartisipasi aktif dalam perdagangan inetrrnasional.

Bentuk bentuk Invetasi dari dana kontribusi kas.

Beberapa bentuk investasi secara umum antara lain:

- a. Investasi otonom
Investasi ini tidak mengalami perubahan (tetap konstan) seiring dengan perubahan tingkat pendapatan
- b. Investasi diinduksi/investasi terimbasi

Investasi yang mengalami perubahan seiring perubahan dalam tingkat pendapatan. Jadi investasi terimbas positif berarti terjadi pada tingkat pendapatan yang tinggi

c. Investasi keuangan

Investasi dilakukan dengan membeli instrumen keuangan, misalnya saham, obligasi, dan surat surat berharga lainnya.

d. Investasi riil

Investasi yang dilakukan dalam bentuk pengadaan pabrik beserta peralatannya, atau pembangunan prasarana umum, misalnya sekolah, jalan, rel kereta di

e. Investasi terencana

Investasi yang dilakukan melalui sejumlah perencanaan dalam beberapa sector ekonomi untuk tujuan tertentu.

f. Investasi tidak terencana

Investasi ini dilakukan tanpa perencanaan dan sering disebut investasi yang tidak diinginkan

g. Investasi bruto

Nilai investasi ini dihitung dari seluruh uang yang digunakan untuk pengadaan modal baru, seperti peralatan, mesin

h. Investasi bersih

Nilai investasi ini dihitung dari nilai investasi bruto dikurangi nilai konsumsi atas modal (penyusutan) selama periode tertentu (biasanya satu tahun).

Menurut Jogiyanto Hartono (2000) beberapa bentuk investasi dapat di dasarkan atas tipenya antara lain:

1. Investasi langsung:

Investasi ini berupa asset keuangan milik suatu organisasi secara langsung.

Investasi langsung antara lain:

- a. Pasa uang (money market) berupa asset yang mempunyai resiko gagal relative kecil misalnya Treasury bill (T-bill)
- b. Pasar modal (capital market) berupa sekuritas pendapatan tetap (fixed income securities) dan saham saham (equity income)
- c. Pasar derivative (derivative market) berupa opsi (option dan futures contract

2. Investasi tidak langsung

Investasi tidak langsung merupakan pembelian saham dari suatu organisasi investasi yang mempunyai portofolio atas asset asset keuangan dari organisasi lain. Organisasi investasi adalah organisasi yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya kepada puiblik dan menggunakan dana yang diperoleh untk diinvestsikan kedalam portofolionya.

Beberapa penggolongan investasi lainnya berdasarkan

a. Berdasarkan sektornya

- Investasi pada sector riil (riil assets)
- Investasi pada sector keuangan (financial assets atau financial market)

b. Berdasarkan skalanya

- Investasi skala kecil
- Investasi skala menengah
- Investasi skala besar

c. Berdasarkan bidang usahanya

- Investasi bidang jasa
- Investasi bidang perdagangan
- Investasi bidang manufaktur

d. Berdasarkan pelaksanaannya

- Investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah
- Investasi yang dilaksanakan oleh swasta

e. Berdasarkan tingkatannya

- Investasi tingkat local/regional
- Investasi tingkat nasional dan
- Investasi tingkat internasional

f. Berdasarkan jangka waktunya

- Investasi jangka panjang (capital expenditure)
- Investasi jangka pendek (operating or revenue expenditure)

g. Berdasarkan tujuannya

- Investasi baru atau benar benar baru
- Investasi perluasan atau ekspansi

h. Berdasarkan pelakunya

- Investasi oleh pihak swasta

- Investasi oleh pihak pemerintah

Karakteristik Investasi dari Dana Kontribusi Kas dan Efisiensi

Beberapa karakteristik dari investasi dari dana kontribusi antara lain:

- Investasi proyek menyerap anggaran dalam prosentase atau absolut nilainya cukup besar
- Manfaat yang akan diperoleh organisasi (misalnya sekolah, universitas) baru dapat dinikmati beberapa waktu kemudian
- Jika dibandingkan dengan investasi aset lancar, maka tingkat resiko yang dihadapi investor dalam investasi proyek lebih besar
- Keputusan investasi yang kelirut tidak dapat di rubah begitu saja seperti dalam hal aset lancar.

Proses Investasi dari dana Kontribusi.

Dibawah ini terdapat lima tahapan dalam proses investasi (Jogiyanto Hartono, 2000) antara lain:

- Penentuan tujuan investasi. Tujuan setiap investor pasti berbeda beda tergantung hasil yang dibuat
- Penentuan kebijakan investasi juga dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

- Pemilihan strategi portofolio, strategi portofolio aktif (prenggunaan informasi dan prediksi atau ramalan-ramalan ekonomi) dan strategi portofolio pasif
- Pemilihan asset. Tahapan ini penting dalam rangka evaluasi sekuritas yang akan di masukkan dalam portofolio
- Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahapan terakhir ini penting dalam rangka pengukuran dengan kinerja portofolio lainnya

Return dan Resiko

Pengertian return

Return (imbal hasil) adalah hasil yang diperoleh dari invesatsi . Pengujian preditabilitas return dapat dilakukan dengan cara (Agung Herry Nugroho, 2000) antara lain:

- Mempelajari pola seasonal return
- Menggunakan data return dimasa lalu
- Mempelajari hubungan return dengan karakteristik organisasi

Pengertian Resiko

Resiko (risk) adalah kemungkinan menyimpangnya imbal hasil sesungguhnya (actual return) dari tingkat imbal hasil yang diharapkan (expected return)

Resiko investasi digolongkan menjadi dua yaitu:

- Resiko sistemik

Sama halnya ini dengan resiko yang tidak dapat di diversifikasi (non diversifiable risk)

- Resiko tidak sistemik

Resiko yang tidak sistemik terjadi karena pengaruhnya tidak sama untuk setiap perusahaan.

Sistem Investasi dana Hasil Kontribusi

Investasi sector riil

Pengertian investasi sector riil.

Investasi riil adalah suatu usaha investasi dengan objek investasi berupa objek riil atau nyata. Objek riil atau nyata bisa saja berupa property, tanah, bangunan, perhiasan. Dengan kata lain, investasi disektor riil adalah segala sesuatu yang dapat bernilai tambahan serta dapat diakses langsung oleh pemiliknya .

Latihan

1. Apa lima proses investasi dari dana kontribusi?
2. Jelaskan pengertian investasi sector riil?

Kunci Jawaban

1. Terdapat lima tahapan dalam proses investasi (Jogiyanto Hartono, 2000) antara lain:
 - Penentuan tujuan investasi. Tujuan setiap investor pasti berbeda beda tergantung hasil yang dibuat
 - Penentuan kebijakan investasi juga dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
 - Pemilihan strategi portofolio, strategi portofolio aktif (penggunaan informasi dan prediksi atau ramalan-ramalan ekonomi) dan strategi portofolio pasif
 - Pemilihan asset. Tahapan ini penting dalam rangka evaluasi sekuritas yang akan di masukkan dalam portofolio
 - Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahapan terakhir ini penting dalam rangka pengukuran dengan kinerja portofolio lainnya
 - Ideologi didefinisikan sebagai sebuah aturan yang terkait erat dengan ide dan keyakinan terhadap dunia dari sekelompok orang dengan menunjukkan bahasa atau perilaku kesejumlah orang atau masyarakat.
2. Investasi riil adalah suatu usaha investasi dengan objek investasi berupa objek riil atau nyata. Objek riil atau nyata bisa saja berupa property, tanah, bangunan, perhiasan. Dengan kata lain, investasi disektor riil adalah segala sesuatu yang dapat bernilai tambahan serta dapat diakses langsung oleh pemiliknya .

Daftar Pustaka

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat, 2016
2. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmit, 2010



CHAPTER 10

Uraian dan Contoh

Pendahuluan

Investasi adalah istilah yang memiliki beberapa pengertian dalam bidang keuangan dan ekonomi (Wikipedia). Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk melakukan kegiatan produksi di masa yang akan datang (barang produksi), seperti pembangunan rel kereta api, jembatan, pembukaan lahan, termasuk misalnya seseorang yang mengambil pendidikan di sebuah universitas. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk asset dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Kadangkala investasi juga diartikan sebagai penanaman modal.

Investasi merupakan suatu penanaman faktor produksi dalam kegiatan tertentu. Hal ini berarti bahwa investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan upaya penarikan sumber dana yang digunakan untuk mengadakan barang modal.

Teknik Perhitungan Kelayakan Investasi

Beberapa Teknik yang bisa digunakan dalam menilai dan menghitung kelayakan suatu kegiatan/proyek terkait sector public antara lain:

- a. Cost benefit analysis
 - Payback period (PP)

- Return on Investment (RoI)
 - Net Present Value (NPV)
- b. Cost Internal Rate of Returns (IRR)
 - c. Analisis Financial

Cost Benefit Analysis

Analisa biaya manfaat adalah pendekatan untuk membuat rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan mengajurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang (William, N. Dunn, 2003)

Menurut Lawrence dan Mears, tahapan dalam melakukan analisis biaya manfaat secara umum meliputi:

- a. Penetapan tujuan analisis secara tepat
- b. Penetapan perspektif yang digunakan (identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat)
- c. Identifikasi besarnya biaya dan manfaat yang diperoleh
- d. Perhitungan estimasi serta kuantifikasi biaya dan manfaat
- e. Perhitungan jangka waktu (discount factor)
- f. Penjelasan terkait keterbatasan dan asumsi

Pada dasarnya Langkah langkah yang perlu diambil untuk menganalisis efisiensi suatu proyek (Medina Ayesha, 2003) antara lain:

- a. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan
- b. Menghitung manfaat dan biaya dalam satuan uang
- c. Menghitung setiap manfaat yang diperoleh dan setiap biaya yang dikeluarkan dalam satuan nilai uang saat ini.

Metoda metoda untuk menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek adalah:

- a. Payback period (PP)
- b. Return on Investment (RoI)
- c. Net Present Value (NPV)
- d. Internal Rate of Return (IRR)

Payback Period (PP)

Payback period adalah jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan (Abdul Choliq, 2004).

Payback period juga dapat diartikan sebagai suatu periode yang diperlukan agar dapat menutup Kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau arus kas bersih.

| | |
|---|----------------|
| Total biaya pengembangan system pada tahun ke-0 | Rp. 25.000.000 |
| Proceed pada tahun ke-1 | Rp. 8.750.000 |
| Sisa biaya pengembangan system pada tahun ke-1 | Rp. 16.250.000 |
| Proceed pada tahun ke-2 | Rp. 11.337.500 |
| Sisa biaya pengembangan system tahun ke-2 | Rp. 4.912.500 |

Sisa = Rp. 4.912.500 X 1 tahun = 0.32 tahun

Rp. 15.427.125

Payback p[eriod sudah dapat dicapai pada tahun ke-2 (2,32 tahun). Biaya pengembangan system akan mencapai titik impas (Break Even Point -BEP) pada waktu 2.32 tahun

Return on Investment (ROI)

Dengan menggunakan metoda ini perhitungan prosentase manfaat yang dihasilkan oleh pengembangan system dalam dibandingkn dengan biaya nya.

Total biaya yang dikeluarkan meliputi biaya pengembangan siste, bioaya pemeliharaan sebvesar Rp. 26.125.000.

Total manfaat yang dihasilkan dari tahun pertama sampai ke tiga, mislanya sebesar Rp. 36.639.625

Perhitungan ROI nya adalah:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Total manfaat} - \text{Total biaya}}{\text{Total biaya}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 36.639.625} - \text{Rp. 26.125.000}}{\text{Rp. 26.125.000}} \times 100\% = 40.25\%$$

RP. 26.125.000

Sistem ini memberi manfaat pada tahun ke-3 sebesar 40,25%

Net Present Value (NPV)

Perhitungan Net Present Value adalah sbb:

$$\text{NPV} = - \text{Nilai proyek} + \frac{\text{Proceed 1}}{(1+i\%)^1} + \frac{\text{Proceed 2}}{(1+i\%)^2} + \dots + \frac{\text{Proceed n}}{(1+i\%)^n}$$

$$= - \text{Rp. 25.000.000} + \frac{\text{Rp. 8.750.000}}{(1+0.15)^1} + \frac{\text{Rp. 11.337.500}}{(1+0.15)^2} + \frac{\text{Rp. 15.427.125}}{(1+0.15)^n}$$

$$= \text{Rp. 1.325.059,59}$$

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan system dapat dilaksanakan karena pada tahun ke-3 diterima sebesar Rp. 1.325.059,59

Nilai NPV lebih besar dari 0 oleh karenanya kegiatan pengembangan sistem tersebut dapat dijalankan

Internal Rate of Return (IRR)

Metode ini ditujukan untuk mencari tingkat diskonto yang menjadikan jumlah saat ini dari masing masing proceed yang didiskontokan dengan tingkat diskonto tersebut besarnya sama dengan jumlah saat ini dari nilai proyek tersebut.

Dari nilai perhitungan sebelumnya diperoleh data, diskonto 15%, NPV sebesar Rp. 1.325.059,59 (positif) . Jika tingkat diskonto menjadi 20% maka,

$$\text{IRR} = \frac{15\% + (20\% - 15\%) \times \text{Rp. } 1.325.059,59}{\text{Rp. } 1.325.059,59 - (-\text{Rp. } 907.335.06)}$$

$$\text{IRR} = 15\% + 2.97\%$$

$$\text{IRR} = 17.97\%$$

Perhitungan tersebut menjelaskan bahwa pengembangan kegiatan system tersebut akan menghasilkan manfaat dengan diskonto sebesar 17.97% pertahunnya.

Apabila tingkat diskonto (external rate of return) yang diinginkan sebesar 15% pertahun maka pengembangan Sistem dapat dilaksanakan karena IRR lebih besar dari 15% (IRR>15%)

Cost Effective Analysis

Cost effectiveness analysis adalah suatu Teknik analisis proyek yang mengestimasi manfaat dan focus pada konsep least-cost dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Efektivitas biaya merupakan ukuran lain yang dapat mencapai tujuan dengan biaya yang minimal. Salah satu upaya yang paling sedikit memerlukan biaya itulah yang paling efektif biayanya.

Latihan

1. Jelaskan langkah langkah yang perlu diambil untuk menganalisis efisiensi suatu proyek (Medina Ayesha, 2003) ?
2. Jelaskan metoda untuk menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek?
3. Apa makna dari Cost Effectiveness Analysis?

Kunci Jawaban

1. Pada dasarnya Langkah langkah yang perlu diambil untuk menganalisis efisiensi suatu proyek (Medina Ayesha, 2003) antara lain:
 - a. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan
 - b. Menghitung mamnfaat dan biaya dalam satuan uang
 - c. Menghiung setiap manfaat yang diperoleh dan setiap biaya yang dikeluarkan dalam satuan nilai uang saat ini.

2. Metoda metoda untuk menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek adalah:
 - a. Payback period (PP)
 - b. Return on Investment (RoI)
 - c. Net Present Value (NPV)
 - d. Internal Rate of Return (IRR)

3. Cost effectiveness analysis adalah suatu Teknik analisis proyek yang mengestimasi manfaat dan focus pada konsep least-cost dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Daftar Pustaka

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat 2016
2. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmit, 2010

The background of the page features a repeating pattern of the Universitas Esa Unggul logo. The logo consists of a stylized circular emblem with blue and orange curved lines, and the text 'Universitas Esa Unggul' below it. The watermark is semi-transparent and covers the entire page.

CHAPTER 11

Uraian dan Contoh

Konsep Dasar Kesejahteraan Minimum

Setiap negara di dunia pasti berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Dengan kata lain, setiap negara memiliki upaya untuk mengantisipasi agar seluruh warganegaranya tidak berada dibawah tingkat kesejahteraan minimum.

Tingkat kesejahteraan minimum adalah standar hidup, bukan hanya kekayaan bersih, terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Negara mempertahankan tingkat kesejahteraan minimum dengan mentransfer tunjangan (bantuan langsung tunai) dan penyediaan bentuk dukungan lainnya bagi yg berada dibawah kesejahteraan minimum.

Komitmen menyeluruh terhadap pengelolaan tingkat kesejahteraan minimum menimbulkan permasalahan:

Pertama: Oportunitis kesejahteraan,. Setiap individu kehilangan pendapatan atau asset lainnya karena adanya hak individu atas pembayaran dari negara, sementara kerugian yang di tanggung investor merupakan akibat dari kegagalan investasi yang mana investasi dalam sistem kesejahteraannya nilainya lebih kecil dan beresiko.

Besarnya kontribusi kesejahteraan adalah nilai saat ini dari investasi yang dipilih dalam system kesejahteraan. Hal ini yang membuat investasi dalam system kesejahteraan menjadi lebih beresiko apabila dibandingkan dengan investasi lain diluar system kesejahteraan, seperti kredit pengembangan usaha,

dan lain sebagainya. Luasnya cakupan masalah yang akan muncul menyebabkan investasi dalam system kesejahteraan memerlukan kehati hatian. Distorsi perilaku kearah pengambilan risiko dan khususnya risiko kredit, mendorong perilaku untuk memperbesar tingkat kesejahteraan minimum.

Kedua, Komitmen secara menyeluruh terhadap orientasi ke pasar bebas dan pengentasan kemiskinan menimbulkan masalah menyembunyian kesejahteraan. Beberapa orang bersedia hidup dibawah tingkat kesejahteraan minimum karena preferensi istimewa yang diperolehnya melalui pemenuhan 'kebutuhan dasar'. Prilaku ini dapat digambarkan dengan 'bersedia mengambil resiko bertahan hidup dibawah tingkat kesejahteraan minimum', namun memiliki investasi yang menguntungkan. Dalam pasar bebas orang orang seperti ini akan menerima tunjangan kesejahteraan berupa kasa dan barang, namun secara tersembunyi tetap memiliki investasi lain yang cukup beresiko.

Oportunis kesejahteraan memiliki kaitan yang erat dengan bentuk 'penyembunyiaan kesejahteraan'. Keduanya timbul dari komitmen terhadap pengentasan kemiskinan dan penyediaan beberapa bentuk dukungan terhadap kesejahteraan

Pengukuran Kesejahteraan

Kesejahteraan individu diperoleh melalui penghasilan individu itu sendiri. Oleh karenanya kekayaan individu terbagi atas tiga:

- Kekayaan fisik, rumah, mesin

- Kekayaan finansial, saham, obliges
- Modal manusia, yaitu kekayaan yang bentuknya bukan uang namun memiliki nilai yang setara dengan uang, seperti keterampilan, kompetensi dan bakat.

Pendekatan untuk mengukur seberapa besar penghasilan individu adalah pendekatan:

- Full income
- Haig-simons

Pendekatan full income adalah ukuran penghasilan individu dengan penjumlahan antara pendapatan yang berupa uang dan pendapatan yang setara dengan uang, seperti penambahandari gaji dan non gaji, ditambah kepuasan kerja, jasa dari kekayaan fisik, nilai produksi dan kenikmatan leisure.

Pendekatan Haig-simons didefinisikan sebagai penjumlahan lajabar dari nilai pasar ha katas konsumsi dan perubahandalam nilai yang disimpan atas hak milik dari awal hiongga akhir periode.

Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan

Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan. Suatu negara dapat dikatakan sejahtera apabila kemiskinannya telah hilang (atau berada pada tingkat yang rendah). Apabila kemiskinannya tidak bisa diatasi, maka dapat

dikatakan bahwa pemerintah atau organisasi public gagal dalam menciptakan kesejahteraan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Mudrajat Kuncoro (1997) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dari kedua definsi tersebut dapat digambarkan secara umum bahwa kemiskinan dapat menyiratkan tiga pernyataan dasar antara lain:

1. Bagaimana cara mengukur standar hidup?
2. Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum?
3. Bagaimana indicator sederhana dapat mampu merepresentasikan masalah kemiskinan yang begitu rumit?

Jeffrey Sacht (2005) menggolongkan kemiskinan ke dalam tiga katogori:

- Kemiskinan ekstrim (absolut)
- Kemiskinan moderat
- Kemiskinan relative.

M Nur Nasution (2004) menggolongkan kemiskinan ada dua:

- kemiskinan struktural
- Kemiskinan alamiah

Sementara itu John Friedman (1992) merumuskan kemiskinan adalah minimnya kebutuhan dasar sebagaimana dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976. Berikut kebutuhan dasar menurut konferensi ILO tersebut:

1. Kebutuhan minimum dari suatu keluarga atas konsumsi pribadi (pangan, sandang, papan, dst)
2. Layanan utama atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk masyarakat pada umumnya (air minum, sanitasi, listrik, angkutan umum, serta fasilitas Kesehatan dan Pendidikan)
3. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan setiap individu dalam masyarakat tersebut
4. Terpenuhinya tingkat absolut atas kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia
5. Penciptaan lapangan kerja baik sebagai alat maupun tujuan dari styaregti kebutuhan dasar.

Garis Kemiskinan

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk

yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Indikator kemiskinan

Penentuan indicator kemiskinan dapat digolongkan ke dalam dua pendekatan:

- Pendekatan moneter, menentukan berdasarkan nilai pendapatan atau nilai pengeluaran konsumsi sebagai batas kemiskinan

Pendekatan moneter yang menggunakan nilai pengeluaran konsumsi dianggap lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan nilai pendapatan karena:

- a. Konsumsi secara riil lebih terikat dengan kondisi kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

b. Bagi para petani didesa terdapat kesulitan dalam menghitung jumlah pendapatan yang diperoleh mengingat pendapatan yang diterimanya tersebut didasarkan pada siklus hasil panen.

- Pendekatan non moneter, menggunakan factor yg tidak terkait dengan uang, misalnya kesehatan, gizi, pendidikan, kepemilikan asset, peran sosial dalam masyarakat, ketidakberdayaan, dan rendahnya penghargaan diri.

Ukuran kemiskinan

Salah satu metode pengukuran kemiskinan yang populer adalah indeks FGT (Foster Gree Thorbecke), terdiri dari tiga indeks:

- Head Count Index (HCI-P0)

Head Count Index atau tingkat kemiskinan sering disimbolkan dengan P0 yang merupakan angka perbandingan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan jumlah masyarakat secara keseluruhan. Nilai P0 berkisar antara 0 sampai dengan 1 (Choril Maksum, 2004)

- Poverty Gap Index (GPI-P1)

Poverty Gap Index atau Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran (gap) dari setiap masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata rata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinan (Choril Maksum, 2004)

- Poverty Severity Index (GSI-P2_)

Poverty Severity Index atau indeks keparahan kemiskinan (P2) yang dapat menggambarkan ukuran penyebaran pengeluaran diantara masyarakat miskin.

Tinggi rendahnya nilai P2, dilakukan melalui pemberian bobot kuadrat pada nilai kesenjangan konsumsi, sehingga disebut juga square poverty gap (Choril Maksum, 2004).

Persentase Penduduk Miskin

Konsep :

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0$

$z =$ garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Konsep

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$$\alpha = 1$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.

Ketimpangan (inequality)

Kesetaraan (equality) didefinisikan dengan equality of final income, yaitu kesetaraan untuk memperoleh pendapatan; equality of public expenditure, kesetaraan dalam pengeluaran public (misalnya layanan Kesehatan Pendidikan), equality of use atau kesetaraan penggunaan layanan public , equality of cost atau kesetaraan biaya yang ditanggung apabila menggunakan layanan public dan and equality of outcome, yaitu kesetaraan untuk mendapatkan hasil layanan public mis kesehatan, pendidikan.

Bagaimana cara mengukur ketimpangan antar individu? Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

1. Untuk melihat perbedaan pilihan ,perbedaan selera tentang penggunaan pendapatan, perbedaan dalam keterampilan yang di butuhkan, dan pendekatan usia, dalam hal ini pengaruh siklus hidup individu
2. Pendekatan dimensi waktu, yaitu persistence poverty dan transient poverty

3. Untuk mengukur ketimpangan antar keluarga yang mana factor pendorongnya adalah consumption argument, yaitu bertambahnya anggota keluarga yang menuntun bertambahnya pendapatan keluarga, serta utility argument yaitu bertambahnya anggota keluarga yang akan meningkatkan utilitas keluarga.

Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud tingkat kesejahteraan minimum?
2. Jelaskan metode pengukuran kemiskinan yang populer adalah indeks FGT (Foster Gree Thorbecke)
3. Apa yang dimaksud dengan ketimpangan?

Kunci Jawaban

1. Tingkat kesejahteraan minimum adalah standar hidup, bukan hanya kekeayaan bersih, terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

2. Metode kemsikinan FGT antara lain?

Head Count Index

Head Count Index atau tingkat kemiskinan sering disimbolkan dengan P0 yang merupakan angka perbandingan masyarakat yang berada di baswah garis

kemiskinan dengan jumlah masyarakat secara keseluruhan. Nilai P0 betrdisar antara 0 sampai dengan 1 (Choril Maksum, 2004)

Poverty Gap Index

Poverty Gap Index atau Indek kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran (gap) dari setiap masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata rata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinan (Choril Maksum, 2004)

Poverty Severity Indeks

Poverty Severity Indek atau indeks keparahan kemiskinan (P2) yang dapat menggambarkan ukuran penyebaran pengeluaran diantara masyarakat miskin.

Tinggi rendahnya nilai P2, dilakukan melalui pemberian bobot kaudratik pada nilai kesenjangan konsumsi, sehingga disebut juga square poverty gap (Choril Maksum, 2004)

3. Ketimpangan (inequality)

Kesetaraan (equality) didefinisikan dengan equality of final income, yaitu kesetaraan untuk meperoleh pendapatan; equality of public expenditure, kesetaraan dalam pengeluaran publik, equality of use, equality of cost and equality of outcome

Konsep kebutuhan dasar minimjum (KDM) adalahh Basic minimum needs, pendekatan alternatif untuk pembangunan , berorientasi social dan berbasis

pada pengembangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masing
masing

Daftar Pustaka

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat, 2016
2. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmit, 2010
3. Kemiskinan dan Ketimpangan, Badan Pusat Statistik

The background of the page features a repeating pattern of the Universitas Esa Unggul logo. Each logo consists of a stylized circular emblem with blue and orange curved lines, and the text 'Universitas Esa Unggul' below it. The watermark is semi-transparent and covers the entire page.

CHAPTER 12

Uraian dan Contoh

Pendahuluan

Undang undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kehidupan yang layak.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dan amanat , dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
- d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES);

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang - Undang maka dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Dewan Jaminan Sosial Nasional ini bertanggungjawab kepada Presiden dengan fungsi utama merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dewan Jaminan Sosial Nasional memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
- b. Mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional; dan

c. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga berhak melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial

Jenis Program Jaminan Sosial

Jenis program jaminan sosial meliputi antara lain:

- a. Jaminan Kesehatan
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Jaminan hari tua
- d. Jaminan pension
- e. Jaminan kematian

Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan sosial dilaksanakan dengan tujuan agar menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan.

Apabila telah terdaftar menjadi peserta jaminan Kesehatan maka akan mendapatkan manfaat antara lain pelayanan Kesehatan yang mencakup pelayanan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative , termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan Kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib.

Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pension, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan pension diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib.

Jaminan pension diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pemiaun atau mengalami cacat total tetap. Dan jaminan pension ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santuann kematian yang dibayarkan kepada ahli warsi yang meninggal dunia.

Pengelolaan dana jaminan sosial dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Badan penyelenggara jaminan sosial wajib memberikan informasi akumulasi iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap peserta jaminan hari tua sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Landasan Hukum Badan pelaksana jaminan sosial nasional

Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selanjutnya disebut BPJS.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip BPJS

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan

Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Ada dua jenis penyelenggara jaminan sosial nasional di Indonesia BPJS adalah:

- a. BPJS Kesehatan; dan
- b. BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program:

- a. jaminan kecelakaan kerja;

- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.

Tugas BPJS

BPJS bertugas untuk:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; menerima Bantuan iuran dari Pemerintah;
- c. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- d. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- e. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- f. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Dengan melaksanakan tugas tugas tersebut diatas, maka BPJS memiliki beberapa kewenangan antara lain:

- a. Menghimpun iuran
- b. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka Panjang

- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya msialnya dalam rangka pembayaran iuran,
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas Kesehatan mengenai besar pembiayaan fasilitas Kesehatan yang memngacu pada standar tarif yang ditetapkan pemerintah.
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas Kesehatan
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang apabila tidak memenuhi kewajibannya
- h. Melakukan Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial

Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
2. Jelaskan prinsip prinsip asuransi sosial?
3. Jelaskan tugas tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

Kunci Jawaban

1. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial

2. Prinsip prinsip jaminan sosial adalah:

a. kegotong-royongan;

b. nirlaba;

c. keterbukaan;

d. kehati-hatian;

e. akuntabilitas;

f. portabilitas;

g. kepesertaan bersifat wajib;

h. dan amanat , dan

i. hasil pengelolaan

Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

3. BPJS bertugas untuk:

a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;

b. memungut dan mengumpulkan luran dari Peserta dan Pemberi Kerja;

c. menerima Bantuan luran dari Pemerintah;

- d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat, 2016
2. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmit, 2010
3. Undang undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Jaminan sosial
4. Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial

The background of the page features a repeating pattern of the Universitas Esa Unggul logo. Each logo consists of a stylized circular emblem with blue and orange curved lines, and the text 'Universitas Esa Unggul' below it. The watermark is semi-transparent and covers the entire page.

CHAPTER 13

Uraian dan Contoh

Indikator Kesejahteraan

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Terdapat beberapa penelitian menggunakan kesejahteraan sebagai konstruk dengan berbagai definisi dan ragam indikatornya. Bradbury et al., (1979) melakukan penelitian untuk menguji model hipotesis apakah perubahan jaminan pendapatan tambahan dan bantuan umum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan kepala keluarga wanita.

Ukuran kesejahteraan ekonomi menggunakan ukuran pendapatan yang kemudian digunakan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ukuran pendapatan dan garis kemiskinan, kesejahteraan ekonomi dengan kepala keluarga wanita dengan tanggungan anak adalah paling rendah jika dibandingkan dengan tanpa anak. Dunst dan Triviette (1988), meneliti hubungan dukungan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan dengan menggunakan indeks kesejahteraan psikologi (Bradburn dan Caplovitz, 1965) dan indeks kesejahteraan individu (Dunst dan Triviette, 1986).

Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka

seseorang sudah dinilai sejahtera , karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron 2012).

Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2007). Kesejahteraan masyarakat sangatlah penting bagi negara. Konsep dan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai kompleksitas persoalan yang sangat beragam. Pengukuran indikator kesejahteraan di Indonesia sering diaplikasikan menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto), namun sebenarnya PDB digunakan sebagai indikator pencapaian kinerja ekonomi.

PDB hanya mampu mengukur kegiatan ekonomi berbasis pasar dengan menganggap komponen - komponen dalam PDB memiliki kontribusi positif terhadap PDB terkecuali impor. Nordhaus dan Tobin (1972) menyatakan bahwa PDB bukanlah alat ukur kesejahteraan.

Di Indonesia indikator kesejahteraan diukur menggunakan 18 variabel. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia berperan dalam mengintroduksi data dan informasi dari 18 indikator tersebut. Indikator yang dimaksud yaitu Laju

Pertumbuhan Penduduk (LPP), Kepadatan Penduduk per km (KPP), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), Pengeluaran per Kapita (PPK), Persentase rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan (PKM), Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Minum Sendiri (FMS),

Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Bukan Tanah (LBT), Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai < 20 M² (LLK), Persentase Rumah Tangga dengan Dinding Tembok (RDT), Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari PLN (PLN), Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri (BAB), Persentase Penduduk Miskin (RTM), Jumlah Pengangguran Terbuka (JPT), Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan yang Lalu (PKK), Persentase Penduduk Mengalami Keluhan Kesehatan dan Kegiatannya Terganggu (PPB) serta Jumlah Penduduk Bekerja (JPB).

Kesejahteraan memang sulit didefinisikan, bahkan para ekonom sering mengalami deadlock ketika ingin menerjemahkan tingkat kesejahteraan yang ideal jika hanya menggunakan satu indikator saja. Simon Kuznets menyatakan bahwa PDB hanya alat ukur pendapatan nasional, sehingga kesejahteraan suatu bangsa hampir mustahil dapat disimpulkan oleh sebuah indikator pendapatan nasional (PDB) (Talberth et al., 2007).

Para ekonom ekologis merancang sebuah indikator kesejahteraan yang berdasar kepada pendekatan pembangunan berkelanjutan yaitu Index of

Sustainable Economic Welfare (ISEW) atau dikenal dengan Genuine Progress Indicator (GPI).

Genuine Progress Indicator (GPI).

Genuine Progress Indicator (GPI) merupakan indikator yang mengukur kesejahteraan dan didasari oleh konsep pembangunan berkelanjutan. GPI dapat digunakan sebagai suplemen para pembuat kebijakan dalam menganalisis tingkat kesejahteraan di suatu negara. GPI pertama kali diperkenalkan oleh Daly dan Cobb pada tahun 1989 yang menghitung tingkat kesejahteraan di Amerika Serikat dari tahun 1950 sampai 1990 (Moffat et al., 2001).

GPI memiliki kerangka pengukuran kesejahteraan yang lebih lengkap dari PDB sehingga dapat memberikan informasi yang lebih baik khususnya informasi mengenai keberlanjutan ekologi, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi (Costanza, 2009). Pembentukan GPI didasari atas kesadaran bahwa kita tidak hidup dalam ekonomi semata, melainkan hidup dalam masyarakat (society) atau lingkungan sosial, dan masyarakat itu sendiri berdiri dalam lingkungan alam (natural environment).

GPI menyertakan konsumsi sebagai faktor utama karena konsumsilah lebih mendekati keakuratan dalam menggambarkan kesejahteraan dibandingkan pendapatan yang dihitung oleh PDB. Selain itu, GPI juga memperhitungkan ketimpangan pendapatan, karena ketika ada ketimpangan, maka setiap

tambahan pendapatan akan memberikan manfaat yang berbeda bagi masing-masing golongan pendapatan (Lawn, 2003).

Selanjutnya, GPI juga menghitung pengeluaran defensive dan menganggap pengeluaran tersebut cerminan penurunan kesejahteraan. Berdasarkan konsepnya, GPI diharapkan dapat menjadi alat ukur yang lebih akurat dan menyeluruh terhadap faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi, baik yang tercermin di pasar maupun yang tidak. Untuk faktor-faktor yang tidak tercermin di pasar, GPI akan menghitung nilai moneter berdasarkan dari laporan dan atau penelitian. Secara umum, formula perhitungan GPI adalah sebagai berikut:

Dalam menggunakan pengukuran GPI sebagai indikator kesejahteraan ada 3 tantangan. Tantangan pertama adalah masih adanya mainstream pembangunan ekonomi yang didasari konsep pertumbuhan ekonomi, dan; karena GPI menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Model pembangunan berkelanjutan cenderung menitikberatkan pada keseimbangan tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan model circular flow yang mainstream selama ini digunakan cenderung menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata. Padahal kesejahteraan manusia tidak dapat serta merta diwakili oleh kinerja ekonomi semata.

Secara alamiah kegiatan ekonomi memang akan melahirkan eksternalitas negatif maupun positif terhadap dimensi lingkungan maupun sosial. Menurut Kuznets (1973) dan Juster (1973) (seperti dikutip oleh Dieren, 1995), kondisi lingkungan semakin lama akan semakin buruk jika kegiatan ekonomi tidak

memperhatikan kapasitas lingkungan dalam menampung eksternalitas negatif, dan akhirnya akan mempengaruhi produktivitas perekonomian itu sendiri.

Tantangan kedua yaitu belum adanya persetujuan secara umum dari konsensus internasional terhadap penggunaan GPI sebagai indikator kesejahteraan. Berbagai upaya semenjak laporan Brundtland Commission (tahun 1987) dan deklarasi Rio (tahun 1992) dilakukan hanya sebatas merekomendasikan ISEW atau GPI sebagai indikator alternatif pembangunan berkelanjutan.

Disamping itu, GPI juga menghitung kegiatan yang tidak berbasis pasar, sehingga perlu penajaman peran lembaga pusat statistik nasional dalam menyediakan data yang tidak berbasis pasar seperti modal lingkungan dan modal sosial. Ketika data sudah tersedia, penerapan GPI relatif akan lebih mudah diimplementasikan di suatu negara.

Tantangan ketiga yaitu aspek politis yang erat kaitannya dengan pemangku kebijakan. Ragam bentuk indikator pembangunan berkelanjutan memang jadi refleksi bagi suatu negara, namun umumnya indikator pembangunan berkelanjutan cenderung memberi informasi yang tidak populis bagi pemangku kebijakan.

Hal tersebut dialami di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan China. Setelah GPI diperkenalkan untuk jadi alternatif indikator pembangunan berkelanjutan, hal tersebut justru memicu gejolak sosial karena dianggap kebijakan pemerintah selama ini tidak mampu mengangkat tingkat kesejahteraan secara signifikan (Moffatt et al., 2001).

Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya political will yang besar dari pemerintah suatu negara untuk memulai langkah besar melalui penerapan GPI sebagai indikator kesejahteraan. Disamping itu, penerapan GPI juga perlu diiringi upaya mainstreaming model pembangunan berkelanjutan di dalam kerangka pembangunan nasional suatu negara untuk dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang efektif mengubah perspektif masyarakat dan pelaku usaha sebagai agen ekonomi.

Kesimpulan

Kerangka pengukuran GPI dapat memberikan arah yang lebih baik daripada PDB untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan. Bagi para pembuat kebijakan, GPI dapat digunakan sebagai indikator suplemen dari PDB karena mampu memberikan perspektif yang berbeda dalam menerjemahkan kesejahteraan, sehingga kebijakan yang harus diambil pun diindikasikan akan bervariasi.

Bagi pembuat kebijakan, GPI dapat memberikan informasi yang lebih baik khususnya dalam memasuki era pembangunan berkelanjutan yang menjadi arus utama model pembangunan di dunia saat ini. Sampai saat ini, memang PDB cenderung sulit untuk digantikan oleh indikator lain untuk melihat kinerja ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari PDB semata.

Semakin memasuki era pembangunan yang berkelanjutan, mulai bermunculan indikator-indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), koefisien gini, Human Capital Index, Green GDP, sebagai indikator alternatif. Hal tersebut merefleksikan ketidakmampuan PDB untuk menerjemahkan tingkat kesejahteraan dan tingkat pembangunan nasional.

Pengukuran GPI diharapkan dapat digunakan di Indonesia dan memberi insight bagi pembuat kebijakan serta para pengamat ekonom untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang multidimensi dengan menyertakan aspek sosial dan lingkungan. Serta mampu memberikan informasi yang lebih tajam untuk menjadi bahan referensi dalam memformulasikan kebijakan publik.

Untuk mendukung upaya penerapan GPI di Indonesia, diharapkan data-data statistik yang tersedia sudah mampu memfasilitasi perhitungan GPI. Dengan menerapkan GPI, pemerintah akan mampu mendeteksi masalah-masalah yang selama ini menghambat proses pembangunan nasional dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan.?
2. Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial?
3. Apa yang dimaksud dengan GPI (Genuine Progress Indicator)?

4. Dalam era pembangunan berkelanjutan (sustainable development), jelaskan beberapa indikator kesejahteraan alternatif pengganti Produk Domestik Bruto (PDB)?

Kunci Jawaban

1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

2. “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron 2012).

3. Genuine Progress Indicator (GPI) merupakan indikator yang mengukur kesejahteraan dan didasari oleh konsep pembangunan berkelanjutan. GPI dapat digunakan sebagai suplemen para pembuat kebijakan dalam menganalisis tingkat kesejahteraan di suatu negara

4. Dalam era pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) terdapat beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), koefisien gini, Human Capital Index, Green GDP, sebagai indikator alternatif.

Daftar Pustaka

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat 2016
2. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmit 2010
3. Gerry Pramudya Sulaiman. (n.d.). Genuine Progress Indicator sebagai Indikator Kesejahteraan. 15.
4. Suyuti Marzuki. (2017, April 30). Social Welfare. Retrieved from wordpress



CHAPTER 14

Uraian

Teori Partisipasi dalam Pengumpulan Dana Kesejahteraan

Definisi Partisipasi Kontribusi Kas Masyarakat

Mubyarto (1989) mendefinisikan kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan masing masing orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sementara itu Swanepoel dan De Beer (dalam MP.Coetzee,dkk.,2001) menjelaskan tiga penghambat dalam partisipasi, antara lain:

- a. Operasional; sentralisasi kekuasaan , keterbatasan kapasitas dan koordinasi, serta teknologi yang kurang memadai.
- b. Budaya kemiskinan; lingkaran setan yang membuat orang terjat dalam kemiskinan
- c. Kurangnya dukungan struktural terhadap partisipasi; struktur yang tepat diperlukan.

Carolie Bryant dan Loise G. White (1982) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan dapat disebut partisipasi kolektif, sementara keterlibatan individu dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual.

Partisipasi tersebut dapat dikategorisasikan kedalam partisipasi vertical dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertical merupakan kondisi masyarakat yang terlibat atau mengambil bagian dalam program pihak lain yang mana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut, atau klien. Sedangkan

partisipasi horizontal muncul setiap anggota kelompok/masyarakat berpartisipasi horizontal satu sama lain, baik dalam melakukan usaha bersama maupun saat melakukan kegiatan dengan pihak lain. Partisipasi horizontal merupakan sinyal awal tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Britha Mikkelsen (2011) membedakan partisipasi dengan enam definisi sebagai berikut:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat terhadap proyek tanpa keikutsertaan dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menerima dan mampu memberikan respons terhadap proyek proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri
- d. Partisipasi adalah proses aktif yang mana menyuarakan makna bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek agar informasi terkait proyek dalam konteks local dan dampak sosialnya dapat diperoleh
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Dari penjelasan penjelsan diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan, serta keikutsertaan mereka dalam proyek proyek pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tahap evaluasi.

Salah satu contoh partisipasi kontribusi kas dalam starategi manajemen untuk kesejahteraan masyarakat adalah pembayaran premi asuransi. Premi asuransi adalah jumlah uang yang dibebankan perusahaan asuransi kepada seseorang (tertanggung) atas keikutsertaannya dalam asuransi.

Beberapa contoh asuransi antara lain:

- a. Asuransi jiwa, umumnya dilakukan pembayaran secara lum sum atas kematian pemegang polis yang mana perinciannya disesuaikan dengan keinginan atau rencana pemegang polis itu sendiri
- b. Asuransi Kesehatan seringkali membayar beberapa biaya, seperti biaya kunjungan dokter, resep obat, prosedur bedah, layanan kesehatan mental, prosedur perawatan berkelanjutan dll. Sehingga besarnya polis asuransi tergantung pada manfaat yang diberikan kepada pemegang polis.
- c. Asuransi mobil, umumnya menanggung kerusakan kendaraan pemegang polis atau saat kendaraan itu hilang atau rusak parah akibat kecelakaan dan lain lain. Pihak asuransi umumnya menyediakan layanan tidak hanya untuk kendaraan roda empat atau lebih bahkan motor ataupun perahu motor dan kendaraan lainnya.

Pentingnya Partisipasi Kontribusi Kas Masyarakat

Orang-orang ingin berpartisipasi dalam keputusan yang penting bagi mereka. Beberapa manfaat perencanaan dan pelaksanaan proses partisipasi public yang efektif antara lain:

- a. Proses partisipasi public merupakan peluang Pendidikan bagi semua orang yang terlibat
- b. Pembuat keputusan dalam kurun waktu yang relatif singkat sering kali mendapatkan tambahan informasi, keahlian teknis, kreatifitas, dan data sosial terkait nilai-nilai, sikap dan preferensi individu atau kelompok yang berpengaruh terhadap keputusan terkait.
- c. Partisipasi masyarakat dapat menghasilkan perubahan perilaku. Kemungkinan seseorang dapat mengubah perilaku saat masyarakat sadar telah menerima semua informasi dan yakin bahwa perubahan tersebut diperlukan.
- d. Partisipasi public yang efektif menyediakan area yang mana akibat dari adanya hambatan komunikasi dapat diperkuat. Dalam area ini dibangun kepercayaan, dan belajar bekerjasama untuk menangani issue tertentu dimasa mendatang.
- e. Orang-orang menerima/mendukung keputusan yang mana terdapat keterlibatan mereka dalam pembuatan keputusan tersebut.
- f. Mengambil bagian dalam partisipasi public yang efektif dapat mendorong adanya tanggung jawab masyarakat.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Diana Conyers (1991) sebagai :

- a. Pertama, alat untuk memperoleh informasi terkait kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang mana tanpa kehadiran masyarakat, program atau proyek pembangunan tersebut bisa terancam gagal.
- b. Kedua, masyarakat lebih mempercayai program dan proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya.
- c. c. Ketiga, terpenuhinya hak demokrasi apabila masyarakat setempat diikutsertakan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan tersebut,.

Bentuk Partisipasi Kontribusi Kas Masyarakat

Beberapa bentuk partisipasi dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan yaitu, partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi ketrampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representative (Saca Firmansyah 2009). Secara umum bentuk partisipasi tersebut selanjutnya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Partisipasi secara riil (berwujud). Partisipasi ini misalnya uang, harta benda , tenaga, dan ketrampilan.

2. Partisipasi secara tidak riil (abstrak). Bentuk partisipasi ini antara lain misalnya, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Partisipasi kontribusi kas (uang) adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda artinya bentuk partisipasi berupa sumbangan harta benda, emas misalnya.

Sistem Partisipasi Dalam Pengumpulan Dana Kesejahteraan

Pengumpulan dana perorangan

Pengumpulan dana perorangan digunakan untuk memenuhi setidaknya delapan kebutuhan finansial dalam individu. Pengumpulan dana perorangan melalui premi tunggal bukan merupakan suatu kewajiban, namun lebih merupakan inisiatif nasabah sendiri untuk menginvestasikan sejumlah kas dalam unit unit investasi.

Delapan kebutuhan utama atas keuangan perorangan adalah:

1. Pengganti penghasilan
2. Dana Pendidikan
3. Akumulasi aset
4. Peningkatan aset

5. Dana pensisun
6. Asuransi kesehatan
7. Perencanaan warisan
8. Program kelangsungan usaha

Pengumpulan Dana melalui Lembaga

Premi dihimpun oleh lembaga asuransi milik pemerintah atau perusahaan milik swasta sebagai dana untuk membayar resiko yang terjadi di masa mendatang. Premi asuransi atau biaya pertanggung jawaban dalam asuransi merupakan prasyarat terjadinya perjanjian asuransi karena tanpa premi tidak ada asuransi (no premium, no insurance). Pada umumnya premi dibayar dimuka tapi ada tenggang waktu pembayarannya. Contohnya dalam polis standar kebakaran dan kendaraan di Indonesia masing masing 30 hari dan 14 hari.

Bentuk bentuk perusahaan asuransi yang ada di Indonesia antara lain:

1. Perusahaan asuransi kerugian, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan yang memberikan penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang

3. Perusahaan reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggung jawaban ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa.
4. Perusahaan pialang asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
5. Perusahaan pialang reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
6. Agen asuransi, adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
7. Perusahaan penilaian kerugian asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggung jawabkan,.
8. Perusahaan konsultan aktuaria, adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pension dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan/atau program pension.

Pengumpulan Dana Setahun sekali

Premi asuransi wajib dibayarkan secara berkala sesuai dengan periode pembayaran yang dipilih, baik secara bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Dalam polis asuransi ditawarkan pilihan pembayaran premi. Pembayaran secara lump sum di awal, yaitu pembayaran premi tunggal atau pembayaran secara berkala selama jangka waktu perencanaan.

Dibawah ini perbandingan antara pembayaran tunggal dan pembayaran secara berkala.:

Single Premium

Untuk individu yang sumber pendapatannya tidak teratur dan ingin memiliki asuransi agar kehidupannya tenang.

Pembayaran dilakukan di awal

Sebagian besar perusahaan asuransi tidak menawarkan pembayaran single premium untuk penderita penyakit kronis.

Tidak semua perusahaan asuransi menawarkan single premium sehingga terdapat pembatasan berbagai asuransi.

Beberapa perusahaan seperti Max New York Life atau MDFC Standard

Life membatasi jangka waktu maksimum untuk single premium masing masing 20 tahun dan 15 tahun.

Pengurang 80C hanya dapat dicairkan sekali.

Pembayaran sebesar jumlah yang ditanggungkan

Reguler Premium

Bagi individu yang memiliki sumber pendapatan tetap dan teratur serta tidak ingin melakukan pembayaran dalam jumlah besar pada awal perencanaan.

Premi dibayar rutin baik secara bulanan, kuartalan, semesteran, maupun tahunan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Tersedianya pertanggungan untuk penderita penyakit kronis, kematian karena kecelakaan, pembebasan premi, tunjangan pengobatan dan rawat inap.

Hampir semua Perusahaan besar memilih reguler premium dari perusahaan asuransi.

Rencana reguler premium tersedia untuk jangka waktu sampai dengan 40 tahun dan sebagian besar menawarkan jangka waktu 30 tahun.

Pengurang 80% bagian dapat dicairkan dalam jangka waktu pembayaran premi.

Pembayaran uang pertanggungan.

Latihan

1. Jelaskan definisi partisipasi kas masyarakat?
2. Jelaskan penghambat partisipasi menurut Swanepoel dan De Beer (dalam MP.Coetzee,dkk.,2001)?
3. Jelaskan 8 kebutuhan utama atas penggunaan uang ?

4. Apa yang dimaksud dengan perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasurans?

Kunci Jawaban

1. Partisipasi kontribusi kas adalah keterlibatan aktif seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan, serta keikutsertaan mereka dalam proyek proyek pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tahap evaluasi.

2. Swanepoel dan De Beer (dalam MP.Coetzee,dkk.,2001) menjelaskan tiga penghambat dalam partisipasi, antara lain:

a. Operasional; sentralisasi kekuasaan , keterbatasan kapasitas dan koordinasi, serta teknologi yang kurang memadai

b. Budaya kemiskinan; lingkaran setan yang membuat orang terjat dalam kemiskinan.

c. Kurangnya dukungan structural terhadap partisipasi; struktur yang tepat diperlukan.

3. Delapan kebutuhan utama atas keuangan perorangan adalah:

- Pengganti penghasilan
- Dana Pendidikan
- Akumulasi asset

- Peningkatan aset
- Dana pensiun
- Asuransi Kesehatan
- Perencanaan warisan
- Program kelangsungan usaha

4. Perusahaan Pialang Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

Perusahaan Pialang Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

Daftar Pustaka

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat, 2016
2. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmit, 2010
3. Undang undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan sosial